

Corruption Prevention Strategy in Indonesia through Strengthening Character Education of Pancasila Ethics

Strategi Pencegahan Korupsi di Indonesia melalui Penguatan Pendidikan Karakter Etika Pancasila

Ruhadi^{a✉}, Hafiz Rafi Uddin^b

^a Universitas Negeri Semarang, Indonesia

ruhadi@mail.unnes.ac.id

^b Universitas Negeri Semarang, Indonesia

hafiz123@mail.unnes.ac.id

✉ Corresponding email: hafiz123@mail.unnes.ac.id

Abstract

Corruption has become a deeply rooted problem in Indonesia's governance system and society. Various efforts to eradicate corruption through legal and institutional approaches have not yielded optimal results. This study aims to analyze corruption prevention strategies through the strengthening of character education as a more effective and sustainable alternative solution. Using a qualitative approach through literature study, this research examines the role of character education in



Author(s). This work licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. The Journal is published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

shaping a generation with integrity and an anti-corruption mindset. The findings indicate that character education integrated into both formal and non-formal educational curricula can serve as a strong foundation for preventing corrupt behavior from an early age. Strategies include integrating anti-corruption values into the curriculum, strengthening the role of higher education, developing the character of Generation Z, and implementing moral education as a preventive strategy. This study concludes that character education is a long-term investment capable of fostering a clean, transparent, and integrity-based culture in national and state life.

KEYWORDS *Character Education, Corruption Prevention, Anti-Corruption, Integrity, Generation Z, Pancasila Ethics*

Korupsi telah menjadi permasalahan yang mengakar dalam sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai upaya pemberantasan korupsi melalui pendekatan hukum dan kelembagaan belum menunjukkan hasil yang optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pencegahan korupsi melalui penguatan pendidikan karakter sebagai solusi alternatif yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini mengkaji peran pendidikan karakter dalam membentuk generasi yang berintegritas dan berkarakter anti korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan formal maupun nonformal dapat menjadi fondasi kuat untuk mencegah perilaku koruptif sejak dini. Strategi yang dapat diterapkan meliputi integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum, penguatan peran perguruan tinggi, pembentukan karakter Generasi Z, serta penerapan pendidikan moral sebagai strategi preventif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan investasi jangka panjang yang mampu membangun budaya bersih, transparan, dan berintegritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KATA KUNCI *Pendidikan Karakter, Pencegahan Korupsi, Anti Korupsi, Integritas, Generasi Z, Etika Pancasila*

Introduction

Korupsi di Indonesia telah menjadi penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan nasional dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Dampak negatif korupsi dapat dirasakan secara luas, mulai dari terhambatnya pemerataan pembangunan, memburuknya pelayanan publik, hingga menurunnya kualitas hidup masyarakat. Data dari Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam kategori negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, meskipun berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan melalui lembaga-lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fakta ini mengindikasikan bahwa persoalan korupsi bukan hanya masalah teknis dalam pengelolaan pemerintahan, melainkan juga masalah yang berakar pada aspek moral dan budaya masyarakat.

Selama ini, pendekatan pemberantasan korupsi di Indonesia lebih banyak mengandalkan aspek represif melalui penegakan hukum dan penindakan terhadap pelaku korupsi. Meskipun pendekatan ini penting untuk memberikan efek jera, namun belum mampu mengatasi akar permasalahan korupsi secara mendasar. Korupsi pada dasarnya adalah persoalan mental dan karakter yang memerlukan penanganan dari aspek pencegahan melalui pembentukan karakter dan moral individu sejak dini. Penegakan hukum yang kuat tanpa diimbangi dengan pencegahan berbasis pendidikan karakter akan membuat upaya pemberantasan korupsi cenderung reaktif dan berulang, karena akar masalahnya tidak pernah benar-benar tersentuh.

Pendidikan karakter muncul sebagai solusi alternatif yang lebih efektif dalam mencegah korupsi. Melalui pendidikan

karakter, nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dapat ditanamkan kepada generasi muda sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang bersih dari korupsi. Proses ini tidak hanya membentuk perilaku yang sesuai dengan norma, tetapi juga menanamkan kesadaran moral sehingga individu mampu menolak godaan untuk berbuat curang dalam situasi apa pun. Burhanudin menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam penanaman dan penguatan pendidikan karakter serta anti korupsi bagi mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan. Perguruan tinggi bukan hanya tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi pusat pembentukan moralitas dan etika yang akan memengaruhi arah kepemimpinan bangsa ke depan.¹

Generasi Z sebagai generasi digital native memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam pembentukan karakter anti korupsi. Lahir dan tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi, generasi ini memiliki akses informasi yang cepat dan luas, namun juga rentan terhadap pengaruh negatif dunia digital. Jannah & Adi menjelaskan bahwa penguatan pendidikan anti korupsi terhadap generasi Z merupakan upaya penting dalam mewujudkan *good citizenship* yang mampu membangun bangsa dengan integritas tinggi.² Oleh karena itu, strategi pendidikan karakter harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan generasi ini, misalnya melalui metode pembelajaran interaktif, penggunaan media digital yang kreatif, dan pemanfaatan tokoh panutan yang relevan bagi mereka.

Integrasi kebijakan pendidikan anti korupsi dengan pendidikan karakter menjadi keniscayaan dalam sistem pendidikan nasional. Yuliani & Muslim mengungkapkan bahwa

¹ Burhanudin, A. A. (2022). Peran Perguruan Tinggi Dalam Penanaman Dan Penguatan Pendidikan Karakter Dan Anti Korupsi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3(4), 137–149.

² Jannah, S. M., & Adi, A. S. (2023). Penguatan Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Generasi Z Sebagai Upaya Mewujudkan Good Citizenship Di Smp Negeri X. *Journal of Civics and Moral Studies*, 8(1), 26–39.

sinergi antara kedua kebijakan ini dapat menghasilkan output pendidikan yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berintegritas tinggi.³ Penggabungan ini diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang komprehensif, yang mengedepankan pembentukan kepribadian unggul sejalan dengan peningkatan kompetensi akademik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan korupsi melalui penguatan pendidikan karakter di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model pendidikan karakter yang efektif untuk mencegah korupsi dan menciptakan generasi yang berintegritas. Dengan adanya pemahaman yang mendalam mengenai strategi ini, diharapkan tercipta kerangka implementasi yang dapat diterapkan secara konsisten di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Di samping itu, penguatan pendidikan karakter dalam pencegahan korupsi juga harus berlandaskan pada etika Pancasila sebagai dasar moral kehidupan berbangsa. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial memberikan arah dan pedoman etis dalam membangun karakter antikorupsi. Etika Pancasila mendorong setiap individu untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan umum. Oleh karena itu, pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bermoral dalam tindakan dan berintegritas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan landasan nilai yang kuat ini, diharapkan generasi mendatang mampu menolak segala bentuk penyimpangan dan berperan aktif dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari

³ Yuliani, N., & Muslim, A. (2024). Integrasi Kebijakan Pendidikan Antikorupsi dengan Kebijakan Pendidikan Karakter. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 12(2).

korupsi.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) sebagai landasan analisis. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali dan memahami fenomena secara mendalam melalui penelusuran berbagai referensi ilmiah yang relevan, sedangkan metode studi literatur digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang komprehensif dari sumber-sumber tertulis. Metode ini dipandang tepat mengingat fokus penelitian adalah penguatan pendidikan karakter berbasis Etika Pancasila sebagai strategi pencegahan korupsi di Indonesia.

Sumber data penelitian meliputi jurnal ilmiah, buku referensi, artikel akademik, laporan penelitian, dokumen resmi, serta publikasi dari lembaga pemerintah maupun organisasi nonpemerintah yang relevan dengan tema pendidikan karakter dan pencegahan korupsi. Sumber data primer difokuskan pada jurnal ilmiah terakreditasi yang terbit pada periode 2022–2025, sehingga informasi yang diperoleh bersifat mutakhir, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yang mencakup proses sistematis mulai dari mengidentifikasi literatur yang relevan, mengumpulkan dokumen, membaca secara teliti, mencatat poin-poin penting, hingga menganalisis isi setiap sumber. Pencarian literatur dilakukan melalui basis data ilmiah internasional seperti Google Scholar, ResearchGate, dan DOAJ, serta portal jurnal nasional seperti SINTA dan Garuda.

Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan tujuan mengidentifikasi tema-tema utama, menemukan pola hubungan antar konsep, serta mengungkap kecenderungan dan perspektif yang muncul dari literatur yang dikaji. Tahapan analisis meliputi pembacaan berulang terhadap setiap dokumen, pengkodean konsep-konsep kunci, pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu, hingga

penyusunan sintesis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Validitas data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai literatur yang berasal dari penulis, institusi, dan latar belakang berbeda. Upaya ini bertujuan meminimalkan bias dan meningkatkan objektivitas temuan. Kredibilitas penelitian diperkuat dengan penggunaan sumber terpercaya, terutama publikasi dalam jurnal bereputasi nasional maupun internasional yang telah melalui proses *peer review*. Dengan strategi ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori dan praktik pendidikan karakter sebagai upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Result & Discussion

A. Konsep Dasar Pendidikan Karakter dalam Pencegahan Korupsi

Pendidikan karakter merupakan upaya sadar, terencana, dan sistematis untuk membentuk kepribadian individu melalui penanaman nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang luhur. Dalam konteks pencegahan korupsi, pendidikan karakter berfungsi sebagai benteng pertahanan moral yang mampu melindungi individu dari godaan melakukan tindakan koruptif. Hal ini sejalan dengan pendapat Ramadhan yang menyatakan bahwa pendidikan moral, sebagai bagian integral dari pendidikan karakter, dapat menjadi strategi preventif yang efektif dalam menangkal budaya korupsi yang telah mengakar di masyarakat.⁴

Pendidikan karakter anti korupsi tidak hanya membekali individu dengan pengetahuan tentang bahaya korupsi, tetapi juga menekankan pada internalisasi nilai-nilai luhur seperti

⁴ Ramadhani, P., Nafis, L., Salwa, F., & Illiya, S. (2025). Pendidikan Moral Sebagai Strategi Preventif Dalam Menangkal Budaya Korupsi. *Scientific Journal for Nation Building*, 1(1), 90–100.

integritas, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Proses internalisasi ini membutuhkan pembiasaan sejak dini melalui keteladanan (*role model*), pengalaman langsung, dan dukungan lingkungan yang kondusif. Misalnya, sekolah dapat menerapkan kebiasaan transparansi dalam pengelolaan keuangan kegiatan ekstrakurikuler sebagai pembelajaran nyata tentang akuntabilitas.

Nilai integritas tercermin dalam keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan, sedangkan kejujuran diwujudkan melalui keberanian untuk berkata dan bertindak sesuai kebenaran. Keadilan bermakna memberikan hak secara proporsional kepada setiap orang, sementara tanggung jawab berkaitan dengan kesadaran menerima konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Kepedulian sosial ditunjukkan melalui sikap menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kelima nilai ini saling terkait dan membentuk fondasi moral yang kokoh dalam menolak segala bentuk korupsi.

Pemahaman yang mendalam tentang dampak destruktif korupsi, seperti hilangnya kepercayaan publik, kemiskinan struktural, dan stagnasi pembangunan, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran moral yang kuat pada setiap individu. Kesadaran ini akan mendorong penolakan terhadap praktik korupsi, baik yang bersifat besar (*grand corruption*) maupun yang kecil (*petty corruption*), sehingga pendidikan karakter benar-benar dapat berperan sebagai pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang berintegritas

B. Peran Perguruan Tinggi dalam Penguanan Pendidikan Karakter Anti Korupsi

Perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam pembentukan karakter mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan. Burhanudin menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai lembaga transfer ilmu pengetahuan tetapi juga sebagai agen pembentuk karakter dan moral mahasiswa.⁵ Dalam sudut pandang pencegahan korupsi, perguruan tinggi harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai anti

⁵ Burhanuddin, Op. Cit.

korupsi dalam setiap aspek kehidupan kampus.

Strategi yang dapat diterapkan perguruan tinggi dalam penguatan pendidikan karakter anti korupsi meliputi integrasi materi anti korupsi dalam kurikulum pembelajaran, pengembangan budaya akademik yang berintegritas, pembentukan lingkungan kampus yang transparan dan akuntabel, serta pengembangan program-program pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pencegahan korupsi.

Salsabila menjelaskan bahwa strategi pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi harus dirancang untuk membentuk karakter mahasiswa sebagai agen perubahan bangsa dan negara.⁶ Mahasiswa yang telah mendapatkan pendidikan karakter anti korupsi diharapkan dapat menjadi pioneer dalam menciptakan budaya bersih di lingkungan kerja dan masyarakat.

Implementasi pendidikan karakter anti korupsi di perguruan tinggi juga memerlukan dukungan dari seluruh sivitas akademika, mulai dari pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa. Komitmen bersama ini penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif bagi pembentukan karakter anti korupsi.

Selain itu, perguruan tinggi juga perlu mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan menarik dalam penyampaian materi anti korupsi. Penggunaan teknologi informasi, studi kasus, diskusi kelompok, dan simulasi dapat menjadi alternatif metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa tentang bahaya korupsi.

C. Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Kurikulum Sekolah

Amelya menekankan bahwa penguatan nilai-nilai pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah merupakan

⁶ Salsabila, I., Abdullah, A., & Ananda, C. (2023). Strategi Pendidikan Antikorupsi untuk Membentuk Karakter Mahasiswa sebagai Agen Perubahan Bangsa dan Negara. *Jurnal Seumubeuet*, 2(1), 63–74.

strategi utama dalam upaya pencegahan korupsi.⁷ Integrasi ini harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur dalam setiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah.

Pendekatan yang dapat diterapkan dalam integrasi nilai-nilai karakter anti korupsi meliputi pendekatan terintegrasi dalam mata pelajaran, pengembangan mata pelajaran khusus pendidikan karakter, dan penciptaan budaya sekolah yang mendukung pembentukan karakter. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri yang perlu dipertimbangkan dalam implementasinya.

Integrasi dalam mata pelajaran memungkinkan nilai-nilai anti korupsi disampaikan melalui berbagai disiplin ilmu, seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Sejarah, Bahasa Indonesia, dan mata pelajaran lainnya. Pendekatan ini memiliki keunggulan karena nilai-nilai karakter dapat dipelajari dalam sudut pandang yang beragam dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Pengembangan mata pelajaran khusus pendidikan karakter memberikan ruang yang lebih fokus untuk pembahasan mendalam tentang nilai-nilai karakter dan implementasinya dalam kehidupan. Mata pelajaran ini dapat dirancang dengan kurikulum yang khusus membahas tentang integritas, kejujuran, dan nilai-nilai anti korupsi lainnya.

Penciptaan budaya sekolah yang mendukung pembentukan karakter anti korupsi meliputi pengembangan tata tertib sekolah yang transparan, implementasi sistem reward and punishment yang adil, pengembangan program-program ekstrakurikuler yang berbasis karakter, dan penciptaan lingkungan sekolah yang kondusif bagi pembentukan karakter positif.

D. Pembentukan Karakter Generasi Z

⁷ Amelya, N., Dany, M., Rahayu, D., Helmina, M., & Zahra, R. F. (2023). Penguanan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kurikulum Sekolah Sebagai Strategi Upaya Pencegahan Korupsi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 1005–1012.

sebagai Upaya Pencegahan Korupsi

Generasi Z memiliki karakteristik yang unik sebagai generasi *digital native* yang lahir dan tumbuh dalam era teknologi informasi. Jannah & Adi menjelaskan bahwa penguatan pendidikan anti korupsi terhadap generasi Z memerlukan pendekatan yang khusus dan disesuaikan dengan karakteristik generasi ini.⁸ Mereka merupakan generasi yang sejak kecil telah akrab dengan gawai, media sosial, dan akses internet yang hampir tanpa batas. Pola interaksi, cara belajar, dan cara berpikir mereka sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang serba cepat, sehingga strategi pendidikan untuk mereka perlu dirancang dengan metode yang relevan dan kontekstual.

Karakteristik generasi Z yang perlu dipertimbangkan dalam pendidikan karakter anti korupsi meliputi ketergantungan tinggi terhadap teknologi, kemampuan *multitasking*, preferensi terhadap pembelajaran visual dan interaktif, serta kecenderungan untuk mendapatkan informasi secara instan. Karakteristik ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan dalam implementasi pendidikan karakter. Di satu sisi, ketergantungan terhadap teknologi memungkinkan mereka dengan cepat mengakses berbagai materi pembelajaran anti korupsi dalam bentuk yang kreatif, seperti video edukasi, infografis, atau podcast. Namun di sisi lain, banjir informasi yang mereka terima setiap hari juga berpotensi menimbulkan *information overload* dan membuat mereka sulit membedakan antara informasi yang valid dan yang menyesatkan.

Strategi pendidikan karakter anti korupsi untuk generasi Z dapat dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti penggunaan aplikasi *mobile*, *game* edukasi, media sosial, dan platform pembelajaran online. Pendekatan ini dapat meningkatkan keterlibatan dan minat generasi Z dalam mempelajari nilai-nilai anti korupsi. Misalnya, *game-game* edukasi dapat dirancang untuk memberikan simulasi situasi yang menguji integritas pemain, sementara media sosial dapat digunakan untuk kampanye nilai kejujuran dan transparansi

⁸ Jannah, Op. Cit.

melalui konten kreatif yang mudah dibagikan. Platform pembelajaran online juga memungkinkan pembelajaran yang fleksibel dan dapat diakses kapan saja, sesuai dengan gaya hidup generasi ini yang cenderung dinamis.

Selain itu, pendidikan karakter untuk generasi Z juga perlu menekankan pada pengembangan *critical thinking* dan *digital literacy* untuk membantu mereka dalam menganalisis informasi dan mengambil keputusan yang etis dalam era digital. Kemampuan berpikir kritis membantu mereka dalam mengevaluasi kebenaran suatu informasi, sedangkan literasi digital membekali mereka dengan keterampilan untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Kedua kemampuan ini penting untuk mencegah generasi Z terjebak dalam praktik-praktik koruptif yang mungkin tersamar dalam bentuk digital, seperti manipulasi data, penipuan daring, atau penyalahgunaan informasi.

Program *mentoring* dan *role model* juga menjadi strategi penting dalam pembentukan karakter generasi Z. Melalui program ini, generasi Z dapat belajar dari pengalaman dan teladan para tokoh yang memiliki integritas tinggi dan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Kehadiran *role model* yang relevan, baik dari kalangan akademisi, aktivis, maupun tokoh publik, dapat memberikan inspirasi nyata bagi mereka untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, interaksi langsung dengan mentor dapat menciptakan hubungan yang membangun rasa tanggung jawab pribadi dan memperkuat komitmen mereka terhadap integritas.

E. Integrasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi dengan Pendidikan Karakter

Yuliani & Muslim mengungkapkan bahwa integrasi kebijakan pendidikan anti korupsi dengan kebijakan pendidikan karakter merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem pendidikan nasional.⁹ Integrasi ini diperlukan untuk menciptakan sinergi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan

⁹ Yuliani, Op.Cit.

pendidikan yang berintegritas. Dengan adanya integrasi, kedua kebijakan tersebut tidak berjalan secara terpisah atau tumpang tindih, melainkan saling melengkapi dalam membentuk generasi yang berkarakter kuat sekaligus memiliki kesadaran anti korupsi yang tinggi.

Proses integrasi kebijakan memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai *stakeholder*, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan. Koordinasi ini penting untuk memastikan konsistensi dan kontinuitas implementasi kebijakan di berbagai level. Tanpa koordinasi yang terstruktur, kebijakan yang dibuat di tingkat pusat sering kali sulit diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah atau institusi, sehingga tujuan yang diharapkan tidak tercapai secara maksimal.

Tantangan dalam integrasi kebijakan meliputi perbedaan perspektif dan pendekatan antara berbagai *stakeholder*, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas sistem pendidikan nasional. Perbedaan perspektif ini dapat menyebabkan kebijakan yang dihasilkan menjadi kurang selaras atau bahkan menimbulkan konflik kepentingan. Keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk pendanaan maupun tenaga pendidik yang terlatih, juga menjadi hambatan serius yang dapat menghambat pelaksanaan integrasi secara optimal. Kompleksitas sistem pendidikan nasional yang mencakup beragam jenjang, kurikulum, dan karakteristik wilayah menuntut adanya fleksibilitas serta strategi adaptif agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif di berbagai konteks. Tantangan-tantangan tersebut perlu diatasi melalui dialog yang intensif, pembagian peran yang jelas, serta komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang sama.

Salam dalam kajian literatur sosiologi agama menjelaskan bahwa tren dan tantangan kebijakan pendidikan karakter dan anti korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang multi-dimensional.¹⁰ Pendekatan ini tidak hanya

¹⁰ Salam, A. M. I., Prayetno, B., & Taufiq, M. S. (2024). Tren dan Tantangan Kebijakan Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi di Indonesia: Kajian Literatur Sosiologi Agama. *SOSIOLOGI*, 1–12.

melibatkan aspek pendidikan tetapi juga aspek sosial, budaya, dan agama dalam pembentukan karakter anti korupsi. Hal ini penting karena pendidikan karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai sosial dan keagamaan akan memiliki daya internalisasi yang lebih kuat di tengah masyarakat yang majemuk.

Implementasi integrasi kebijakan juga memerlukan pengembangan instrumen monitoring dan evaluasi yang tepat untuk mengukur efektivitas program pendidikan karakter anti korupsi. Instrumen ini harus mampu mengukur tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik dalam pembentukan karakter. Dengan demikian, penilaian tidak hanya berfokus pada sejauh mana peserta didik memahami konsep anti korupsi, tetapi juga bagaimana mereka menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari. Monitoring yang efektif juga dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, memastikan bahwa integrasi kebijakan benar-benar memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan perilaku koruptif di masa depan.

F. Peran Hukum dalam Mendorong Efektivitas Program Pendidikan Karakter Anti Korupsi

Putri & Marcellina menjelaskan bahwa hukum memiliki peran penting dalam mendorong efektivitas program pendidikan karakter anti korupsi.¹¹ Peran hukum tidak hanya sebagai instrumen *punishment* tetapi juga sebagai *framework* yang memberikan legitimasi dan kekuatan hukum bagi implementasi program pendidikan karakter. Dengan adanya payung hukum yang jelas, setiap program pendidikan anti korupsi memiliki dasar legal yang kuat untuk dijalankan secara konsisten dan terukur, sehingga mengurangi potensi penyimpangan atau penghentian program akibat perubahan kebijakan yang bersifat sementara.

Regulasi yang mendukung implementasi pendidikan

¹¹ Putri, S. N., & Marcellina, D. (2024). Pengaruh hukum dalam mendorong efektivitas program pendidikan karakter anti korupsi. *Siyasah*, 4(2), 166–179.

karakter anti korupsi meliputi undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, peraturan pemerintah tentang pendidikan karakter, dan berbagai kebijakan teknis yang mengatur implementasi program di tingkat institusi pendidikan. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan dan implementasi program pendidikan karakter anti korupsi. Selain itu, harmonisasi regulasi antar lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa kebijakan anti korupsi dalam pendidikan berjalan selaras dan saling mendukung.

Selain itu, hukum juga berperan dalam memberikan perlindungan bagi pelaksana program pendidikan karakter anti korupsi. Perlindungan ini penting untuk memberikan rasa aman bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, pelaksana program dapat menghadapi risiko intimidasi atau tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Dengan jaminan perlindungan hukum, pendidik akan lebih percaya diri dan bebas dari rasa takut ketika mengajarkan nilai-nilai integritas, bahkan dalam situasi yang rawan konflik kepentingan.

Enforcement hukum yang konsisten terhadap pelaku korupsi juga memberikan efek edukasi bagi masyarakat tentang konsekuensi dari tindakan koruptif. Penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tidak pandang bulu akan mengirimkan pesan moral yang kuat bahwa korupsi adalah pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi. Hal ini dapat memperkuat pesan-pesan yang disampaikan dalam program pendidikan karakter anti korupsi, sehingga siswa dan masyarakat memahami bahwa nilai integritas bukan sekadar teori, tetapi memiliki implikasi nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Namun demikian, peran hukum harus diimbangi dengan pendekatan persuasif melalui pendidikan karakter. Pendekatan yang terlalu mengandalkan aspek represif tanpa diiringi pembinaan moral dapat menciptakan efek jera sesaat, tetapi tidak menyentuh akar persoalan. Oleh karena itu, kombinasi

antara pendekatan represif melalui hukum dan pendekatan preventif melalui pendidikan karakter diharapkan dapat menciptakan efek sinergis dalam pencegahan korupsi. Pendekatan ganda ini memungkinkan terciptanya sistem yang tidak hanya menghukum pelanggar, tetapi juga membangun kesadaran dan komitmen masyarakat untuk secara sukarela menolak segala bentuk tindakan koruptif.

G. Strategi Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi

Implementasi pendidikan karakter anti korupsi memerlukan strategi yang tepat dan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing institusi pendidikan. Strategi ini harus mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program. Selain itu, strategi tersebut juga harus memperhatikan konteks sosial, budaya, dan lingkungan tempat institusi pendidikan berada, karena faktor eksternal sering kali memengaruhi efektivitas penerapan pendidikan karakter.

Tahap perencanaan meliputi analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan target, pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran, penyiapan sumber daya manusia, dan alokasi anggaran. Perencanaan yang matang menjadi kunci keberhasilan implementasi program pendidikan karakter anti korupsi. Dalam tahap ini, penting untuk melibatkan berbagai pihak seperti guru, kepala sekolah, orang tua, dan komunitas lokal agar program yang dirancang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.

Pelaksanaan program harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh komponen institusi pendidikan. Pelaksanaan yang efektif memerlukan dukungan kepemimpinan yang kuat, komitmen seluruh stakeholder, dan menciptakan budaya yang kondusif bagi pembentukan karakter. Dalam praktiknya, pelaksanaan ini dapat diwujudkan melalui kegiatan pembelajaran di kelas, program ekstrakurikuler berbasis karakter, hingga kegiatan

sosial kemasyarakatan yang melatih siswa untuk mempraktikkan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab.

Monitoring dan evaluasi program perlu dilakukan secara berkala untuk mengukur pencapaian tujuan dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan pengembangan program ke depan. Proses evaluasi ini sebaiknya tidak hanya berfokus pada pencapaian kognitif peserta didik, tetapi juga pada perubahan sikap, perilaku, dan kebiasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Strategi implementasi juga harus mempertimbangkan keragaman kondisi dan karakteristik institusi pendidikan di Indonesia. Pendekatan *one size fits all* tidak akan efektif dalam sudut pandang keragaman ini, sehingga diperlukan fleksibilitas dalam implementasi program. Dengan menyesuaikan metode pembelajaran, materi, dan kegiatan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan, program pendidikan karakter anti korupsi akan lebih mudah diterapkan dan mampu memberikan hasil yang optimal.

H. Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi

Implementasi pendidikan karakter anti korupsi menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai efektivitas program. Tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya, resistensi perubahan, kompleksitas sistem pendidikan, dan pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung.

Keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun finansial, menjadi kendala utama dalam implementasi program pendidikan karakter anti korupsi. Banyak institusi pendidikan yang belum memiliki tenaga pendidik yang kompeten dalam bidang pendidikan karakter dan anggaran yang memadai untuk mengembangkan program ini.

Resistensi perubahan dari berbagai pihak juga menjadi

tantangan yang tidak mudah diatasi. Perubahan paradigma dari pendidikan yang berorientasi pada aspek kognitif menuju pendidikan yang seimbang antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik memerlukan waktu dan proses yang tidak singkat.

Namun demikian, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong implementasi pendidikan karakter anti korupsi. Peluang ini meliputi dukungan kebijakan pemerintah, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter, perkembangan teknologi informasi, dan gerakan anti korupsi yang semakin menguat di masyarakat.

Dukungan kebijakan pemerintah melalui berbagai regulasi dan program memberikan legitimasi dan kekuatan bagi implementasi pendidikan karakter anti korupsi. Dukungan ini perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan program yang efektif dan berkelanjutan.

Conclusion

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi pencegahan korupsi melalui penguatan pendidikan karakter merupakan pendekatan yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia. Pendidikan karakter memiliki peran fundamental dalam membentuk mental dan moral individu sejak dini, sehingga dapat menjadi benteng pertahanan yang kuat terhadap godaan untuk melakukan tindakan koruptif. Upaya ini tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi mengenai bahaya korupsi, tetapi juga pada pembentukan kesadaran moral, sikap, dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan keadilan.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi strategi ini memerlukan pendekatan yang multidimensional, meliputi integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum pendidikan, penguatan peran perguruan tinggi sebagai agen pembentuk karakter, pembentukan karakter generasi Z yang disesuaikan dengan karakteristiknya, integrasi kebijakan pendidikan anti korupsi dengan pendidikan karakter, dan

dukungan regulasi yang kuat. Pendekatan multidimensional ini memungkinkan terjadinya proses pendidikan yang holistik, yang melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami konsep anti korupsi, tetapi juga mampu menginternalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Keberhasilan strategi ini memerlukan komitmen dan kerja sama dari seluruh *stakeholder*, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, dan keluarga. Tanpa dukungan dan sinergi dari semua pihak, program pendidikan karakter anti korupsi tidak akan mencapai hasil yang optimal. Pemerintah perlu menyediakan regulasi yang jelas dan dukungan anggaran yang memadai, sementara institusi pendidikan harus memastikan integrasi nilai anti korupsi dalam setiap aktivitas pembelajaran dan budaya sekolah atau kampus. Masyarakat memiliki peran penting sebagai pengawas sosial, dan keluarga menjadi fondasi pertama dalam menanamkan nilai-nilai integritas kepada anak sejak dini.

Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi pendidikan karakter anti korupsi, seperti keterbatasan sumber daya, resistensi perubahan, dan kompleksitas sistem pendidikan. Namun demikian, peluang-peluang yang ada, seperti dukungan kebijakan pemerintah dan meningkatnya kesadaran masyarakat, dapat dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi pendidik, dan kerja sama lintas sektor dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat implementasi program ini.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah mengembangkan model implementasi pendidikan karakter anti korupsi yang lebih spesifik dan terukur, melakukan penelitian empiris tentang efektivitas program pendidikan karakter anti korupsi, dan mengembangkan instrumen evaluasi yang tepat untuk mengukur keberhasilan program. Model implementasi tersebut sebaiknya mempertimbangkan konteks lokal, karakteristik peserta didik, serta kondisi sosial-budaya di setiap daerah, sehingga strategi yang diterapkan benar-benar relevan

dan efektif.

Sebagai penutup, pendidikan karakter anti korupsi merupakan investasi jangka panjang yang memerlukan kesabaran dan konsistensi dalam implementasinya. Meskipun hasilnya tidak dapat dilihat secara instan, pendekatan ini memiliki potensi yang besar untuk menciptakan generasi yang berintegritas dan mampu membangun Indonesia yang bersih dari korupsi. Dengan adanya komitmen kolektif dan upaya yang berkelanjutan, diharapkan budaya anti korupsi dapat tertanam kuat dalam setiap lapisan masyarakat, sehingga cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dapat terwujud secara nyata.

References

- Amelya, N., Dany, M., Rahayu, D., Helmina, M., & Zahra, R. F. (2023). Penguatan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kurikulum Sekolah Sebagai Strategi Upaya Pencegahan Korupsi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 1005–1012.
- Burhanudin, A. A. (2022). Peran Perguruan Tinggi Dalam Penanaman Dan Penguatan Pendidikan Karakter Dan Anti Korupsi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3(4), 137–149.
- Jannah, S. M., & Adi, A. S. (2023). Penguatan Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Generasi Z Sebagai Upaya Mewujudkan Good Citizenship Di Smp Negeri X. *Journal of Civics and Moral Studies*, 8(1), 26–39.
- Putri, S. N., & Marcellina, D. (2024). Pengaruh hukum dalam mendorong efektivitas program pendidikan karakter anti korupsi. *Siyasah*, 4(2), 166–179.
- Ramadhani, P., Nafis, L., Salwa, F., & Illiya, S. (2025). Pendidikan Moral Sebagai Strategi Preventif Dalam Menangkal Budaya Korupsi. *Scientific Journal for Nation Building*, 1(1), 90–100.
- Salam, A. M. I., Prayetno, B., & Taufiq, M. S. (2024). Tren dan

Tantangan Kebijakan Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi di Indonesia: Kajian Literatur Sosiologi Agama. *SOSIOLOGI*, 1–12.

Salsabila, I., Abdullah, A., & Ananda, C. (2023). Strategi Pendidikan Antikorupsi untuk Membentuk Karakter Mahasiswa sebagai Agen Perubahan Bangsa dan Negara. *Jurnal Seumubeuet*, 2(1), 63–74.

Yuliani, N., & Muslim, A. (2024). Integrasi Kebijakan Pendidikan Antikorupsi dengan Kebijakan Pendidikan Karakter. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 12(2).

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None

ACKNOWLEDGMENT

None

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : February 18, 2025

Revised : June 7, 2025

Accepted : July 1, 2025

Published : July 30, 2025

Notification

Starting from the 2024 issue, our journal has transitioned to a

new platform for an enhanced reading experience. All new articles and content will now be available on this updated site. However, we would like to assure you that archived issues from 2021 to 2023 are still accessible via the previous site. You can view these editions by visiting the following link:
<https://journal.unnes.ac.id/sju/lsr/issue/archive>